

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Agustino. L, 2008. Dasar – dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Anggara Sahaya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washinton: Cogressional Quaerterly Inc.
- Grindle, Merilee S. 1950. Politics and Policy Implementation in The Third World (New Jersey: Princnton University Press.
- Hoogerwerf. 1983. Ilmu pemerintahan. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim. Adam .2010.teori,perilaku dan budaya organisasi. Bandung : PT Refika Aditama.
- Moleong, J.2011. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, dkk. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant, 2004, Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Elex/Gramedia.
- Santoso, Pandji. 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti.2001.Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja.Bandung:PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P.2014.Administrasi Pembangunan.Jakarta:PT Bumi Aksara.

Subarsono, Drs. AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E .1975, The Policy Implementation Process – A Conceptual Framework,(Journal Administration and Society.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

### **Jurnal :**

Arsyad. Dkk. 2016. Analisis pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada LPSE Kota Kendari. Jurnal Ekonomi. Vol .1(1), E-ISSN: 2503-1937.

Habibi,Untari. 2018. Efektivitas pelaksanaan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Jurnal Ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Vol. 3, Nomor 2, ISSN: 2528-0767.

Handayani F, Nur M, dkk. 2019. Implementasi good governance di indonesia. Jurnal pemikiran administrasi negara. Vol.11 no.1. ISSN : 2085-6555.

Mulyono,Setyawan. 2018. Efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui penerapan probity advice di kabupaten trenggalek. Jurnal Reformasi. Volume 8 Nomor 2, ISSN 2088-7469.

Nahuway,Tamaela. 2020. Model efektivitas dan efisiensi E-Procurement serta dampaknya terhadap kepuasan pengguna di provinsi Maluku. Jurnal Maneksi, VOL 9, NO. 1, e-ISSN: 2597- 4599.

Nugraha, Joko Tri ,2018. E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman), Jurnal Komunikasi dan Kajian Media. Vol 2, No 1 2018.

Lusiana, Lidia.2018. Implementasi Program Indonesia Pintar (Pip) Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi

Kasus di SDN 011 dan SDN 013). eJournal Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 1, 2018 :6991-7005 ISSN 2541-674.

Suprianto.dkk. 2019. Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol 5, No 2, ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887. Malang : Universitas Brawijaya.

**Internet :**

Artikel Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821-/kpk-sebut-70-persen-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>  
Penulis : Ardito Ramadhan 26 Agustus 2020.

Artikel Kompasiana.com <https://www.kompasiana.com/hielmanrachsalem6781/5bc8be23aebe11fe3369d32/tonny-supriadi-proses-lelang-di-kota-depok-lambat> penulis : Hielman dan Harry ,19Oktober 2018.

Artikel Depokpos.com <https://www.depokpos.com/2015/07/ada-indikasi-korupsi-di-pengadaan-seragam-dan-sepatu-siswa-depok/?amp>

**Perundang – undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit kerja pengadaan Barang/ Jasa lingkungan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barng/Jasa.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok.

